

BAB I

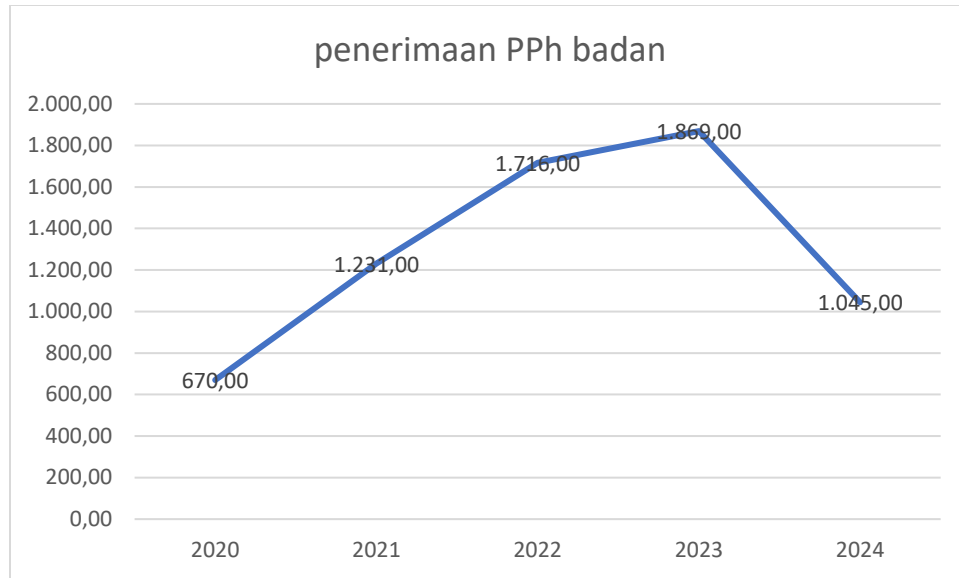
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara butuh aktifitas pembangunan, tetapi pembangunan ini juga perlu dilakukan dengan penuh perhatian dan kehati-hatian. Maka, pemerintah membutuhkan pendanaan yang konsisten dan berkualitas tinggi dalam jumlah yang besar. Dalam hal memenuhi kebutuhan pendanaan ini, pajak merupakan sumber utama bagi negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk investasi infrastruktur. Indonesia kaya akan sumber daya alam, terutama energi fosil seperti gas, minyak, dan batu bara. Namun, hanya sebagian kecil dari sumber daya ini yang dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) karena keterbatasan modal dan teknologi (Makhfudz, 2016).

PSAK No. 1 (revisi 2017) menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk mengevaluasi keadaan ekonomi, hasil usaha, dan perubahan keadaan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dianut. Penggunaan laba sangat penting untuk mengestimasi potensi perubahan data ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, memperoleh informasi dari data yang ada, dan menghasilkan ringkasan efisiensi usaha dengan menggunakan data. Pajak penghasilan merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Pajak penghasilan (PPh) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pinjaman pribadi atau resmi yang dibayarkan.

Berdasarkan data dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berada dalam posisi yang krusial sebagai pengamat utama realisasi pajak dari setiap tahun. Pajak penghasilan (PPh) terbanyak diterima oleh negara diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh) badan yang persinya sebesar 20,2 %. Pajak Penghasilan Badan (PPh badan) diakui sehubungan dengan penghasilan yang dipatuhi atau yang merupakan hasil dari persyaratan pajak yang telah ada selama satu tahun dan diuraikan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1983. Dasar pengenaan pajak penghasilan badan adalah laba bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan setelah dikurangkan dengan berbagai biaya yang diizinkan.



Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan PPh Badan (Angka Rupiah dalam Triliun)
 Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Menurut CNBC Indonesia Tahun 2024, pajak penghasilan tahun ini tidak sebaik tahun sebelumnya, pendapatan pajak tahunan mengalami penurunan. Pendapatan pajak Mei 2024 adalah 8,4% dari Mei 2023, atau sebanyak Rp 830,5 triliun. Pada 30 Juni 2024, penerimaan pajak hanya sebesar Rp 893,8 triliun, atau 7,9% dari periode sebelumnya, yaitu Rp 970,2 triliun. Pada Juli 2024 mencapai Rp 1.045,3 triliun, atau meningkat 5,8% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.109,1 triliun. Menteri Keuangan, memberikan informasi mengenai penerimaan pajak yang terjadi pada saat konferensi Pers terkait dengan kondisi perekonomian saat ini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada tahun 2024, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa berdasarkan jenis pajaknya, ada yang mengalami penurunan secara neto, diantaranya ialah setoran PPN DN dan PPh Badan. Sisanya, untuk enam jenis pajak lainnya mengalami peningkatan baik secara neto dan bruto. Secara nominal, setoran PPh badan telah mencapai Rp 191,85 triliun atau 18,4% dari total penerimaan pajak. Namun, secara neto, jumlah yang diterima dari PPh Badan berkurang 33,5% dan secara bruto berkurang 23,8%. Dengan demikian, pada tahun yang sama tahun lalu, jumlah tersebut meningkat sebesar 24,2% secara neto dan 18,1% secara bruto. Terperosoknya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan karena penurunan kinerja perusahaan pada 2023, harga-harga komoditas yang turun secara drastis atau

mengalami normalisasi dan kenaikan restitusi. Hal ini mengakibatkan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badan tahunan mengalami penurunan cukup drastis.

Menurut DDTC News Tahun 2024, Menteri Keuangan mengindikasikan bahwa penerimaan PPh badan terkait erat dengan penurunan harga komoditas. PPh badan dengan kontribusi terbesar terhadap keseluruhan penerimaan pajak hingga April 2024. Korporasi-korporasi yang memberikan kontribusi sebesar 22% terhadap profitabilitas pajak mereka, juga mengalami penurunan pembayaran pajak.

Tahun 2024, menurut Sri Mulyani metode neto dalam memperoleh PPh badan lebih efektif dibandingkan metode bruto. Alasannya, penerimaan pajak secara neto lebih memperkuat restitusi yang mengalami pertumbuhan. Penerimaan PPh badan secara bruto minus 29,1% hingga April 2024.

PPh badan mengalami kontraksi yang cukup dalam baik neto maupun bruto. Hal ini dikarenakan adanya restitusi yang menyatakan bahwa korporasi yang berkontribusi 22% terhadap penerimaan pajak. Profitabilitasnya mengalami penurunan sehingga bayar pajaknya menurun, dibandingkan tahun lalu meningkat 23,8%, dikutip dari pajak.com.

Menurut Sri Mulyani 2024 menurunnya penerimaan PPh badan turut memengaruhi kinerja dari komponen PPh non-minyak dan gas (nonmigas). Pada komponennya, PPh nonmigas berkontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar Rp 377 triliun atau 35,45% dari target. Masih cukup sesuai jalurnya selama empat bulan, yang dimana masih sepertiga, tapi jika dilihat dari pertumbuhannya secara bruto tumbuh negatif 5,43%.

Setoran pajak penghasilan badan yang turun sebesar 35,7% neto jauh dari pemasukan per Mei 2023 yang hanya sekitar 24,8% menjadi penyebab penurunan penerimaan pajak. Setoran pajak penghasilan badan tersebut mengindikasikan bahwa ada beberapa bisnis yang mengalami penurunan profitabilitas atau angsuran. Akibatnya, setoran pajak penghasilan tahunan dan angsurannya turun, yang diiringi dengan meningkatnya restitusi.

Pada Tahun 2024, Menurut Sri Mulyani, setoran pajak penghasilan badan mengalami peningkatan untuk industri perdagangan, pengolahan, dan pertambangan, yang secara kolektif berkontribusi sebanyak 25,6%, 24,4%, dan 5,9% pada jumlah keseluruhan pajak yang diterima. Tingkat pertumbuhan bersih untuk industri pengolahan adalah 14,2% pada Mei 2024, dibandingkan dengan 8,3% pada Mei 2023. Sektor perdagangan tumbuh 0,2%

dari sebelumnya 10,6%, sedangkan sektor pertambangan tumbuh 60,5% dari sebelumnya 59,6%.

Pada ketiga sektor yang dijelaskan, sektor pertambangan yang mengalami penurunan tertinggi. Setoran pajak dari sektor pertambangan mencapai Rp 19,4 triliun, turun 26,8% dibandingkan tahun lalu, Adapun realisasi setoran pajak sektor pertambangan menyumbang 5,83% dari total penerimaan pajak. Sri Mulyani menyampaikan bahwa “Tambang dan manufaktur tekanannya cukup besar karena harga komoditas. Kemudian, menimbulkan restitusi yang harus dibayarkan kembali”. Seperti fenomena yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan Badan, dengan fokus pada Net Profit Margin, Struktur Modal, dan Manajemen Laba.

Net Profit Margin adalah indikator profitabilitas yang menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan saat memperoleh laba bersih. *Net Profit Margin* adalah rasio keuangan yang mengukur proporsi laba bersih terhadap total pendapatan setelah dikurangkan dengan seluruh beban yang terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. *Net Profit Margin* dipengaruhi oleh tingkat pajak yang dikenakan pada laba bersih. Perusahaan yang mengalami penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dikarenakan mengalami penurunan pada profitabilitas atau keuntungan yang turun.

Adanya *net profit margin* sebagai rasio keuangan yang dapat membantu dalam perhitungan profitabilitas pada sebuah perusahaan yang memudahkan untuk melakukan perhitungan. Pada penelitian (Nisa et al., 2021) *Net Profit Margin* menyatakan bahwa “tidak memberikan dampak yang berarti terhadap seberapa baik variabel Pajak Penghasilan Badan Terutang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya”. Sedangkan pada penelitian Cici Wulandary, Zufriзал, Farida Khairani, dan Mas Ut (2022) menyatakan bahwa “Rasio profitabilitas, atau margin laba bersih, memiliki dampak positif dan signifikan secara statistik dengan variabel dependen, yaitu Pajak Penghasilan Badan Terutang”.

Sebuah konsep dalam bidang keuangan yang dikenal sebagai modalitas struktural mengacu pada rasio hutang terhadap ekuitas yang digunakan oleh bisnis. Mengidentifikasi struktur modal terbaik sangat penting untuk operasi bisnis karena akan membantu operasi perusahaan meminimalkan rata-rata tertimbang modal dan memaksimalkan nilai saham

perusahaan. (Dharmawan et al., 2021)”. Penggunaan rasio DER dalam analisis modal struktural penelitian ini sebagai metrik di mana total aset dibagi dengan total kewajiban. Struktur modal yang tidak memadai, terutama hutang yang berlebihan, dapat melemahkan kemampuan perusahaan dalam mencapai target produksi.

(N. Anggraini & Muin, 2021)Perusahaan yang mempunyai rasio utang terhadap aset yang tinggi akan mempunyai beban bunga yang lebih signifikan, dan dapat mengurangi laba bersih pada laporan keuangan yang nantinya akan berpengaruh terhadap PPh badan. Jika jumlah bunga secara signifikan lebih besar dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, maka produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan, yang tentunya akan berdampak pada PPh badan. Pada penelitian (Arisandy, 2021) menyatakan bahwa “Besarnya utang perusahaan dibandingkan dengan modalnya tidak memiliki hubungan yang kuat dengan jumlah pajak penghasilan yang harus disetor”. Pada penelitian (N. Anggraini & Muin, 2021) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio *Debt to Equity Ratio*, semakin rendah besaran pajak penghasilan badan yang dibayarkan oleh perusahaan.

Manajemen laba melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengelola laba perusahaan, baik dengan cara meningkatkan, menurunkan, atau meratakannya. Intervensi ini dapat berupa penggunaan metode akuntansi, estimasi akuntansi, atau keputusan operasional yang mempengaruhi laba yang sedang diamati. Penting bagi pemangku kepentingan dalam memahami statistik manajemen laba, dikarenakan mereka mampu untuk mengidentifikasi potensi manipulasi keuangan dan membuat keputusan yang lebih akurat.

PT Timah Tbk, sebuah perusahaan pertambangan, sebelumnya pernah melakukan praktik manajemen labapada laporan keuangan tahun 2018. Maka, peneliti ingin menelaah lebih dekat mengenai praktik manajemen laba yang terjadi di industri pertambangan. Menurut penelitian Ayudia dan Arief (2022), “Manajemen laba tidak mempunyai dampak yang signifikan pada pajak penghasilan badan (PPh).” Menurut penelitian (Andriani et al., 2021), “Manajemen laba tidak memiliki dampak yang berarti pada Pajak Penghasilan.”

Dari uraian diatas, perbedaan yang ditemukan antar penelitian sebelumnya memicu rasa ingin tahu peneliti untuk menggali lebih jauh. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengajukan peneliti dengan judul “**Net Profit Margin, Struktur Modal dan Manajemen**

Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi fenomena yang telah dikemukakan pada tabel, dapat diketahui bahwa *Net Profit Margin*, Struktur Modal, dan Manajemen Laba dapat berdampak pada PPh Badan Terutang. Oleh karena itu, masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Margin Laba Bersih memiliki dampak terhadap PPh Badan Terutang?
2. Apakah Struktur Modal memiliki dampak terhadap PPh Badan Terutang?
3. Apakah Manajemen Laba memiliki dampak terhadap PPh Badan Terutang?
4. Apakah *Net Profit Margin*, Struktur Modal, dan Manajemen Laba memiliki dampak terhadap PPh Badan Terutang?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian diatas, hasil yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk memahami dan memberikan klarifikasi mengenai Margin Laba Bersih dalam kaitannya dengan PPh Badan Terutang.
2. Untuk memahami dan memberikan klarifikasi mengenai Struktur Modal dalam kaitannya dengan PPh Badan Terutang.
3. Untuk memahami dan memberikan klarifikasi mengenai Manajemen Laba dalam kaitannya PPh Badan Terutang.
4. Untuk memahami dan memberikan klarifikasi mengenai *Net Profit Margin*, Struktur Modal, dan Manajemen Laba dalam kaitannya PPh Badan Terutang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai institusi. Manfaat yang akan diberikan oleh praktik ini adalah sebagai berikut::

1. Bagi peneliti selanjutnya:

Peneliti berharap dapat memberikan pengetahuan baru mengenai PPh badan dan menjadi referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam hal mengkaji terkait fenomena masalah mengenai *net profit margin*, struktur modal, dan manajemen laba terhadap PPh badan terutang pada perusahaan sektor pertambangan.

2. Bagi pihak universitas:

Peneliti percaya bahwa penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai referensi dan sumber pengajaran bagi seluruh staf Universitas. Diharapkan penelitian ini bisa mejadi sumber literatur pengganti untuk studi ilmiah di masa mendatang terkait definisi dan indikator dari setiap variabel yang diteliti serta pengaruh variabel independent terhadap pph badan.

3. Bagi perusahaan:

Peneliti percaya bahwa penelitian ini akan berguna dalam membantu pemilik bisnis yang terkait dengan sektor pertambangan dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi PPh badan.